

**PENGARUH DOMINASI
KELOMPOK SANTRI DALAM
DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA
(Studi Kasus di Desa Wringinrejo
Kabupaten Mojokerto)**

Jacko Ryan

Departemen Ilmu Politik, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga

Article history

Received : 26 Mei 2020

Revised : 2 Juli 2020

Accepted : 7 Juli 2020

*Corresponding author email:

jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id

No. doi: <https://doi.org/10.24198/sawala.v1i2.27520>

Abstraksi

Kehidupan di desa selalu terkait erat dengan unsur budaya dan agama. Kedua aspek ini berdampak pada aktivitas yang terjadi di desa-desa, yang sebagian besar adalah aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi heterogenitas kelompok agama-budaya di masyarakat pedesaan dan dampaknya terhadap dinamika tata pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif di Desa Wringinrejo, Kabupaten Mojokerto. Melalui penelitian ini, teori Agama Jawa yang ditemukan oleh Clifford Geertz ditemukan tidak relevan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya konvergensi antara kelompok Santri dan Abangan dan terjadinya akulturasi budaya dan agama di Desa Wringinrejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika tata pemerintahan Desa Wringinrejo didominasi oleh kelompok Santri. Berbagai kegiatan politik juga dilakukan oleh kelompok Santri dan telah mempengaruhi berbagai kebijakan di desa.

Kata kunci: abangan, pemerintahan desa, santri, variasi religio-kultural.

Abstract

Life in the village was always closely linked to cultural and religious elements. Both of these aspects get an impact on the activity that occurs in the villages, most of which is the activity of government. Therefore, this research explored the heterogeneity of religious-cultural groups in rural communities and their impact on village governance dynamics. This research was conducted by a qualitative descriptive method in the village of Wringinrejo, Mojokerto Regency. Through this research, the theory of the Javanese Religion invented by Clifford Geertz was found irrelevant. This is indicated by the convergence between the Santri the Abangan groups and the acculturation of culture and religion in the Village of Wringinrejo. The results of this research showed that the governance dynamics of the Wringinrejo Village were dominated by the Santri group. A variety of political activities also were performed by the Santri group and have influenced various policies in the village.

Keywords: abangan, religious-cultural variants, santri, village government.

PENDAHULUAN

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, kehidupan di desa tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan berbagai unsur lokal yang terdapat di daerahnya demi terwujudnya

kesejahteraan dalam masyarakat setempat. Definisi tersebut menjadikan desa memiliki peran strategis dalam bangunan struktur politik nasional.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dijalani oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Didalamnya terdapat kepala desa yang dibantu oleh segenap

perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti sekretaris desa, kepala urusan dan kepala lingkungan. Adapun Badan Perwakilan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi legislasi beranggotakan wakil-wakil masyarakat Desa yang berada di tiap rukun warga. Pada umumnya, mereka terdiri dari pemuka agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya.

Keterlibatan masyarakat pada struktur pemerintahan desa seperti ini memunculkan implikasi atau pengaruh timbal balik diantara keduanya. Salah satunya dalam segi religio-kultural yang melekat pada kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Salah satu teoritis yang menyorot hal demikian yakni Clifford Geertz. Agama Jawa, dalam pandangannya, merupakan dampak sosiologis dari adanya hubungan interdependensi antar masyarakat. Geertz dikenal melalui klasifikasinya terhadap masyarakat Islam-Jawa ke dalam tiga varian, yaitu: abangan, santri, dan priyayi (Kahmad, 2009). Munculnya variasi religio kultural tersebut karena dilatarbelakangi stratifikasi yang terdapat di desa-desa Jawa. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat pengaruh dari desa, pasar dan pemerintah selaku struktur sosial utama yang terdapat di desa. Ketiga kelompok tersebut juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Abangan yang berciri animistik, Santri yang didominasi oleh karakteristik Islam serta Priyayi yang menekankan aspek Agama Hindu (Mahasin, 1981).

Tipologi yang digagas oleh Geertz tersebut dipandang bukan saja berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat Jawa, namun juga pada kehidupan politik desa. Hal tersebut misalnya tercermin pada keterwakilan masing-masing kelompok dalam pemerintahan desa. Berbagai kelompok berbasis religius- kultural dimungkinkan dapat mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan di desa. Jika sampai pada tahap ini, konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok tersebut menjadi tidak terhindarkan hingga memunculkan konflik di dalam masyarakat desa itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko,

Kabupaten Mojokerto sebagai tempat penelitian. Desa Wringinrejo yang diambil dari kata '*Wringin*' yang berarti Beringin dan '*Rejo*' yang berarti ramai. Melalui etimologi itu, Wringinrejo dapat diartikan sebagai "pohon beringin yang ramai". Desa-desa pada wilayah tersebut memiliki hubungan interdependensi antara agama dan masyarakat. Muncul implikasi bahwa terdapat pengaruh agama terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap agama. Dalam tulisan ini, akan dielaborasi lebih lanjut mengenai hubungan interdependensi tersebut, terkhusus dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Wringinrejo.

Penelitian serupa pernah dilakukan Setyawan dan Khotimah. Penelitian bertajuk "Politik Akomodatif dalam Masyarakat Multi Agama" mengungkap peran pemerintah desa dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di desa. Lembaga resmi desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjalankan berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan musyawarah mufakat dalam masyarakat. Dengan itu, pemerintah desa berhasil menghadirkan suatu politik akomodatif yang dapat menampung segala kepentingan masyarakat beragama di desa (Setyawan & Khotimah, 2019). Juga penelitian dari Chalik bertajuk "Sintesis Mistik dalam Kepemimpinan Politik Jawa". Penelitian tersebut menganalisis kehidupan sosial budaya dari masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari nilai mistik-spiritual dan berpengaruh pada kepemimpinan politik di ruang publik (Chalik, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "PENGARUH DOMINASI KELOMPOK SANTRI DALAM DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto)".

KAJIAN PUSTAKA

Abangan, Santri, dan Priyayi

Geertz mendefinisikan variasi religio kultural masyarakat Jawa ke dalam ketiga istilah: Abangan, Santri, dan Priyayi. Santri digambarkan Geertz sebagai suatu kelompok Muslim yang taat menjalankan

ritus keagamaan (Marsono, 2000). Santri didefinisikan oleh Geertz sebagai kelompok yang terpelajar, melek huruf, dan pandai menulis (Madjid, 1997). Kesalahannya ditandai dengan rajin menjalankan ibadah shalat lima waktu dengan berjamaah di masjid, shalat jumat, shalat 'id, dan puasa Ramadhan (Geertz, 1960). Sebaliknya untuk kelompok Abangan secara etimologi berasal dari bahasa Arab (*aba'an*). Ini bisa diartikan sebagai orang Islam Jawa yang tidak sering memperhatikan ajaran agama Islam, kurang teliti dalam memenuhi perintah-perintah agama, masih nampak sinkretismenya atau masih terikat dengan unsur-unsur lokal pra-Islam dan Hindu-Buddha sehingga sering dinamakan dengan "Agama Jawa".

Kelompok Santri dan Abangan yang didefinisikan Geertz menghasilkan banyak respon. Salah satunya yakni MM Billah yang menyebut bahwa tipologi Geertz belum menggambarkan realitas Masyarakat Jawa seutuhnya. Adapun yang menjadi unsur-unsur (indikator) yang dipergunakan dalam penentuan santri-abangan adalah: (1) sembahyang lima kali sehari, (2) membaca Al-Quran, (3) kepergian ke pondok (pesantren), (4) keanggotaan dalam NU, (5) penyelenggaraan *selametan*, (6) sembahyang Jumat, (7) puasa Ramadhan, dan (8) minat terhadap lagu-lagu Arab (irama padang pasir)(Billah, 1984).

Tipologi tersebut dapat terbentuk di desa apabila kondisi di desa terdapat interaksi yang masih terjalin erat antara satu sama lain. Soekanto merumuskan interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi semacam demikian akan terlihat lebih dominan apabila terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak – pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. "Reaksi" disini yang disebutkan Soekanto sebagai salah satu syarat dalam interaksi sosial. Ketika tidak ada pengaruh dan reaksi dalam sistem sosial, maka interaksi sosial tidak mungkin terjadi dalam masyarakat (Soekanto, 1990).

Soekanto juga memberikan ciri-ciri dari desa, antara lain: (1) mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam, (2) sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan, (3) cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien karena belum mengenalnya mekanisme pertanian, (3) golongan orang-orang tua memegang peranan yang penting, (4) pengendalian sosial masyarakat masih sangat terasa kuat, (5) rasa persatuan erat sekali, saling mengenal dan menolong, (5) dan dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak langsung karena segala sesuatu berjalan atas dasar musyawarah (Soekanto, 1990).

Pemerintahan Desa

Dalam mengurus kepentingan masyarakat, desa memiliki otonominya tersendiri. Hal tersebut menjadi penting karena otonomi memberi hak sepenuhnya kepada pemerintah desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self-governing community*). Setidaknya ada dua hal yang disorot dalam definisi otonomi desa: pertama yakni pemberian dan pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya sendiri (desentralisasi) dan yang kedua yakni adanya usaha untuk menghargai unsur lokal dari masing-masing desa.

Dua hal tersebut mengubah arah pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dahulu, pemerintahan desa dijalankan secara seragam dan menghilangkan keragaman budaya dan agama yang terdapat di desa-desa. Hal tersebut dilakukan karena pengaruh modernisasi yang kuat sehingga meniadakan penghargaan akan kearifan lokal. Karena itu, pemerintahan desa berjalan sangat sentralisitis (*top-down*) sehingga partisipasi masyarakat diabaikan dan bahkan terhalang oleh peran birokrat.

Pasca Orde Baru, pemberdayaan pemerintahan desa dilakukan. Pendekatan yang bersifat partisipatoris terus diusahakan dalam pemerintahan desa. Pendekatan demikian sejatinya merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokratisasi dengan

melibatkan elemen masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (Suzetta, 2007). Hal ini bermanfaat untuk mencapai asas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan itu pula, masyarakat lokal akan berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pengawasan, hingga implementasi (Wearing & Mc Donald, 2002).

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan (Adiyoso, 2009). Kombinasi antara kebutuhan, aset lokal dan prakarsa lokal banyak desa menghadirkan kewenangan lokal dalam perencanaan dan penganggaran, baik yang berorientasi pada pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi lokal.

Dalam merespon budaya yang terdapat di desa, ada lima model pemerintahan yang dapat dijalani (Suwaryo, 2011). Model pertama yakni desa murni adat. Konteks dari model tersebut yakni adanya desa yang memiliki nuansa adat yang kental sehingga masyarakat sangat memiliki keterikatan pada adat istiadat maupun agama. Kedua hal tersebut sangat terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat. Model ini meniadakan birokrasi pemerintahan sehingga urusan masyarakat desa dilimpahkan kepada kecamatan atau tingkat di atasnya dan tentunya meminimalisir konflik antara administrasi desa dengan adat istiadat.

Model kedua yakni desa administratif yang berlaku di daerah yang mana adat istiadat dan keagamaannya yang mulai memudar. Globalisasi yang menawarkan akses desa ke kota semakin terbuka menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah mengalami perubahan di mana yang semula berbasis hukum ataupun lembaga adat atau agama berubah menjadi birokrasi yang modern dan mapan. Tegangan antara legitimasi adat atau agama dan birokrasi desa tidak tercipta dalam model ini sehingga pemerintah desa dapat lebih

leluasa mengelola pemerintahan dan pembangunan.

Model ketiga yakni model integrasi antara legitimasi adat atau agama dan birokrasi desa. Dalam konteks ini, desa tidak bisa sepenuhnya melarang aturan adat atau agama. Beberapa cara yang dapat dilakukan yakni desa membuat aturan-aturan sosial dalam kegiatan-kegiatan adat. Melalui musyawarah, perangkat desa bersama tokoh adat atau agama menetapkan sanksi dan aturan lokal yang disepakati bersama sehingga kebudayaan dan nilai-nilai agama dapat diinstitutionalisasi melalui peraturan desa.

Model keempat yakni adanya dualisme antara adat dan desa sehingga tercipta pembagian wewenang. Desa dinas akan bertugas dalam urusan birokrasi pemerintahan dan desa adat akan menjalankan tugas dan fungsi kearifan lokal yang ada. Model yang terakhir yakni dikenal dengan nama kelurahan. Model seperti ini berlaku pada kota-kota modern di mana daerah tersebut sudah tidak mempunyai adat dan desa lagi. Kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah bertugas menjalankan berbagai administrasi pemerintahan yang berasal dari tingkat di atasnya (kecamatan, kota, dan lain-lain).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode tersebut sejalan dengan karakteristik dari penelitian ini yang berusaha melihat proses alamiah yang terjadi di masyarakat (Sugiyono, 2016). Penelitian dilakukan dalam lingkup Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan religio kultural. Penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasi, sehingga hasil dari penelitian ini tentu tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau mencerminkan kondisi di luar Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto.

Subjek dalam penelitian ini adalah elemen-elemen masyarakat Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto. Lebih rinci lagi, subjek-subjek penelitian tersebut terbagi dalam beberapa kelompok seperti (1) tokoh masyarakat, (2) masyarakat desa, (3) ketua lembaga-lembaga budaya dan agama di desa, (4) pemerintah desa dan berbagai perangkatnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berdasarkan wawancara. Dalam teknik wawancara terstruktur, peneliti dapat memperoleh informasi secara lisan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan terperinci untuk pengumpulan data berdasarkan permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik wawancara berupa pertanyaan yang terstruktur dan memiliki garis-garis besar pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah. Teknik kedua yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi. Itu merupakan suatu proses melihat, mencatat, serta pengamatan terhadap data primer yang berkaitan dengan perilaku manusia, fenomena sosial, bentuk fisik varian budaya dengan menggunakan pedoman observasi. Peneliti juga terlibat dalam interaksi sosial di arena kegiatan yang diamati dan diwujudkan oleh tindakan pelakunya.

HASIL

Keadaan Penduduk Desa Wringinrejo

Desa Wringinrejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang memiliki daerah dengan tinggi rata-rata permukaan laut 30 meter dengan luas wilayah 1.70 km² (tidak termasuk hutan negara) dengan penduduk sejumlah 2.870 jiwa. Data penduduk Desa Wringinrejo sendiri berjumlah 2.615 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1.320 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.295 serta terdapat 664 rumah tangga. Selain dimanfaatkan untuk permukiman penduduk, lahan sekitar desa juga digunakan untuk mengembangkan desa baik pertanian, infrastruktur serta inovasi lain yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas yang dapat dinikmati untuk umum.

Terdapat tiga dusun dalam Desa Wringinrejo yakni Dusun Wringinrejo sebagai pusat kegiatan (termasuk pusat pemerintahan desa), Dusun Sambirejo dan sebelah Selatan terdapat Dusun Jambangan. Setiap dusun diberi otonomi mengurus masyarakatnya dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada desa dalam periode tertentu dan bertahap melalui musyawarah. Sebelum mengadakan suatu musyawarah desa,

jaring aspirasi warga dilaksanakan ditingkat RT yang pada umumnya dilakukan satu bulan sekali untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan keluhan yang dihadapi warga. Dari tingkat RT itu kemudian dibawa dalam suatu musyawarah ditingkat dusun untuk mencapai suatu pemecahan solusi. Apabila tidak menemukannya ditingkat dusun, maka akan dibahas dalam musyawarah desa. Terdapat aktivitas lainnya seperti rapat rutin minimal satu bulan sekali bersama Ketua RW, Kepala Desa, BPD dan elemen masyarakat terkait untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi.

Masyarakat Desa Wringinrejo mayoritas beragama Islam dengan komposisi terbanyak yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan LDII. Hampir 98% jumlah penduduk mayoritas penduduk NU, terdapat 3 kepala keluarga Muhammadiyah, LDII berjumlah 5 kepala keluarga dan Kristen 1 kepala keluarga. Dengan komposisi penduduk demikian, desa didominasi oleh kelompok varian NU dengan berbagai kebiasaannya hingga menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dalam musyawarah desa, aspirasi setiap masyarakat merupakan hal utama yang sangat penting. Tidak melihat dari kelompok mana masyarakat tersebut, suara mereka tetap diperhitungkan. Aspirasi yang telah dijaring berdasarkan pertimbangan skala prioritas akan menjadi bahasan dari setiap musyawarah desa dan setiap masyarakat memiliki hak suara yang sama. Selain kelompok varian tersebut, terdapat juga berbagai organisasi di desa seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai wadah dalam beraktualisasi warga desa.

Aspirasi-aspirasi warga didapatkan melalui sebuah acara perkumpulan rutin warga desa baik organisasi bentukan pemerintahan desa maupun perkumpulan acara keagamaan seperti, pengajian, perkumpulan acara muslimat dan lain-lain. Menurut warga Desa Wringinrejo, kegiatan tersebut lebih efektif dilakukan pada saat acara keagamaan karena baik dari segi intensitas, acara keagamaan sering diadakan dan dalam segi relasi, terdapat kedekatan antar individu yang terlibat didalamnya. Hal demikian sangat efektif

dalam membangun sebuah komunikasi yang harmonis antarwarga. Kegiatan lainnya yang terdapat di Desa Wringinrejo antara lain Musyawarah Desa (Musdes) maupun Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain Perangkat desa berupa Kepala Desa beserta jajarannya dan BPD, kelompok-kelompok dalam seluruh elemen masyarakat juga dilibatkan dan menunjukkan partisipasinya. Itu terlihat kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang berguna untuk menjangkau aspirasi masyarakat di tingkat RT maupun lembaga-lembaga keagamaan seperti IBNU, Muslimat, Fatayat, Anshor dan lain sebagainya.

Perekrutan anggota perangkat desa maupun BPD dititikberatkan pada profesionalitas dan transparan yang berdasarkan kapabilitas individu. Sedangkan pemilihan anggota BPD dilakukan secara musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dan diharapkan mampu menghasilkan calon yang dapat membawa aspirasi masyarakat secara baik.

Acara keagamaan berkembang menjadi budaya dalam masyarakat di Desa Wringinrejo. Acara keagamaan seperti Pengajian, Tahlilan, Diba'an, dan sebagainya lambat laun mengikis budaya masyarakat Jawa seperti pertunjukan Wayang, Orkes, Reog, Gamelan dan lain-lain. Budaya yang berasal dari kepercayaan Kejawaen hampir sudah tidak ditemui dalam masyarakat desa dan seluruhnya diganti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Tahlilan, Yasinan, Diba'an, Hadrah, Rebana dan Banjari yang dilakukan secara rutin tiap minggu secara bergilir. Adat istiadat yang masih dilestarikan di Desa Wringinrejo berupa "Ruwat Desa", yaitu kegiatan pengajian bersama yang dilakukan secara turun-temurun oleh warga desa. Ruwat Desa dilaksanakan menjelang bulan Ramadan dan menjadi simbol akan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Sang Pencipta kepada penduduk desa. Kegiatan Ruwat Desa dapat diikuti oleh segenap masyarakat, tanpa membedakan latar belakang setiap masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Wringinrejo juga identik dengan kelompok Muslim NU seperti IBNU, PBNU, Banser, Anshor, dan kelompok bentukan desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani (Kelompok Tani Makmur I dan Kelompok Tani Makmur II) dengan pembagian berdasarkan wilayah yang minimal luasnya 30 hektare dan harus secara resmi terdaftar dalam Kementerian Pertanian.

Mata pencaharian masyarakat sekitar 15% yaitu petani, dengan kaum muda bekerja disektor pabrik, industri sepatu, industri helm, kerajinan kayu bahkan mebel. Mayoritas petani tergantikan oleh industrialisasi sehingga hampir sulit menemukan petani yang benar-benar menggarap sawah. Rata-rata lahan pertanian disewakan kepada pengusaha luar dan petani di Desa Wringinrejo hanya berstatus sebagai buruh tani. Desa Wringinrejo juga melakukan suatu bentuk pelatihan agar warga desa dapat memanfaatkan lahan untuk meningkatkan pendapatan keluarga seperti menanam tanaman jamu di lahan kosong sekitar rumah. Selain menambah nilai guna dari lahan, hal tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

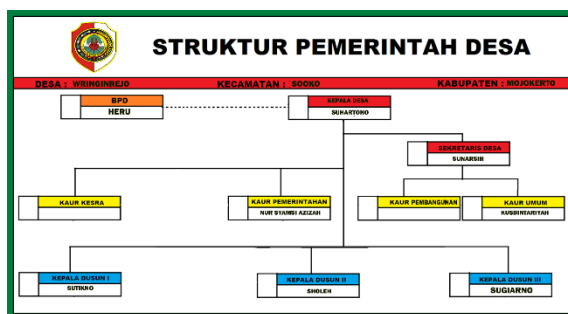
Keadaan dan Perkembangan Politik Desa

Sebagaimana hasil Pemilu 2014 lalu, partai yang mendominasi suara di Kabupaten Mojokerto yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan sebanyak 16.839 suara. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Mojokerto masih melekatkan dirinya pada identitas Presiden Abdurahman Wahid yang merupakan tokoh NU karena sebagian besar warga Kabupaten Mojokerto merupakan warga NU. Lalu perolehan yang kedua disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan sebanyak 13.949 suara.

Di Desa Wringinrejo sendiri, partai dengan perolehan suara terbanyak adalah PKB. Warga Desa Wringinrejo banyak memilih PKB karena memang mayoritas warga Desa Wringinrejo adalah NU dan memiliki ideologi yang sejalan dengan NU. Setelah PKB, hasil perolehan suara terbanyak kedua adalah PDIP. Untuk hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa Wringinrejo, pasangan Joko Widodo

dan Maaruf Amin unggul dibanding dengan hasil suara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan presentase sebesar 75% - 25%, atau jika dilihat dengan hasil suara sebesar 1.286 suara untuk pasangan calon nomor urut 01 dan perolehan suara 494 suara untuk pasangan calon nomor urut 02. Pencapaian tersebut lagi-lagi menunjukkan jika kelompok mayoritas membawa dampak dan pengaruh yang cukup besar dalam dinamika politik di Desa Wringinrejo.

Struktur Pemerintahan Desa



Gambar 1

Struktur Pemerintahan Desa Wringinrejo

Gambar di atas merupakan struktur pemerintahan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kepala Desa yakni yang diemban oleh Suhartono dan sejajar dengan Kepala Desa ada BPD yang diketuai oleh Heru. Kepala Desa dibantu tugasnya dengan beberapa perangkat Desa yang ada yakni: Sunarsih (Sekretaris Desa), Kepala Urusan Pemerintahan (Nur Syamsi Azizah) dan Kepala Urusan Umum (Kusbintariyah). Terdapat dua jabatan yang kosong yakni Kepala Urusan Kesejahteraan dan Kepala Urusan Umum. Membawahi Kepala Desa yakni terdapat tiga Kepala Dusun yang terdiri dari Kepala Dusun 1 yang diemban oleh Sutikno, Kepala Dusun II yang diemban oleh Sholeh dan Kepala Dusun III yang diemban oleh Sugiarno.

Peta Desa



Gambar 2

Peta Desa Wringinrejo

PEMBAHASAN

Variasi Kelompok Religio Kultural

Keadaan di Desa Wringinrejo lebih didominasi Islam dengan aliran Nadlatul Ulama (NU). Walau tidak menutup kemungkinan, terdapat kelompok masyarakat beraliran dan beragama lain walau dengan jumlah yang sangat sedikit. Realitas demikian yang kemudian menegaskan kritik dari Billah terhadap konsep Agama Jawa menurut Clifford Geertz. Billah menekankan tipologi Agama Jawa masih belum bisa menampung kenyataan yang sebenarnya (*complexity*) dari sifat kejamakan (*pluralism*) masyarakat (Billah, 1984).

Karakteristik utama yang membedakan kelompok santri Desa Wringinrejo dengan tipologi menurut Geertz yakni penerimaan mereka pada budaya lokal. Kegiatan keagamaan yang dihayati masyarakat tidak terbatas seperti yang disebutkan Geertz, yakni ibadah shalat lima waktu dengan berjama'ah di masjid, shalat jum'at, shalat 'id, dan puasa Ramadhan, namun justru melebar pada kegiatan-kegiatan duniawi (Geertz, 1960).

Hal tersebut nampak dalam Ruwat Desa. Itu adalah tradisi turun temurun yang dilakukan penduduk desa tersebut sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus mohon keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa yang juga merupakan penduduk asli dari Desa Wringinrejo, dapat ditemukan bahwa tradisi Ruwat Desa sudah dijalankan sejak 1982. Namun lambat laun, praktik tersebut berkembang dengan adanya unsur-unsur religi yang ada dalam tradisi Ruwat Desa. Itu terwujud dengan menghadirkan kyai untuk ceramah agama dalam tradisi Ruwat Desa. Artinya, unsur santri sebagaimana yang digagas oleh Geertz hadir dalam unsur budaya yang selama ini justru melekat pada kaum abangan. Tradisi yang dijalani masyarakat di Desa Wringinrejo tidak dapat dilepaskan oleh nilai-nilai agama. Diundangnya kyai dalam acara tersebut bertujuan untuk mendoakan masyarakat.

Walaupun di satu sisi Desa Wringinrejo memiliki kekuatan secara religius, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi praktik-praktik yang tidak berciri-khas kelompok santri. Kelompok abangan, di mana didefinisikan oleh Mufidah sebagai suatu kelompok yang akrab dengan dunia hitam dengan perilaku dan budaya melanggar norma agama seperti pasif menjalankan ritual agama, bahkan cenderung konfrontatif terhadap kelompok santri, suka mabuk-mabukan, judi togel, prostitusi dan kondisi ekonomi lemah semakin menghalangi penetrasi mereka ke dalam zona santri khususnya pondok pesantren (Mufidah, 2012). Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Wringinrejo. Dalam sesi wawancara dengan salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT), terungkap bagaimana kegiatan sabung ayam kerap kali dilakukan warga Desa Wringinrejo. Dominasi kelompok santri di Desa Wringinrejo tampak belum bisa mereduksi berbagai kegiatan yang kontra dengan nilai-nilai santri.

Dalam penelitiannya akan kontestasi abangan-santri pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa, Yogi Setya Permana merumuskan bahwa Kalangan abangan Islam Jawa masih menghayati ritus *slametan* yang menandai setiap fase kehidupan orang Jawa seperti

memperingati peristiwa kematian, kelahiran, dan pernikahan. Hal demikian ditandai dengan keberadaan situs-situs keramat yang menempati peran penting dalam kosmologi spiritual masyarakat abangan (Permana, 2010). Fenomena serupa nyatanya dapat ditemukan di Desa Wringinrejo. Misalnya dengan praktik spiritual guna memperingati peristiwa kematian masih terjadi di Desa Wringinrejo. Peringatan tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Namun itu tidak berlaku dengan keberadaan situs-situs keramat. Di Desa Wringinrejo sendiri terdapat satu makam leluhur. Itu adalah makam Mbah Imam Tauhid atau yang dikenal sebagai Mbah Cukit. Ia merupakan tokoh penyebar agama Islam di Desa tersebut. Sebagaimana penuturan dari informan yang merupakan warga desa, keberadaan makam tersebut tidak dikeramatkan oleh warga Desa Wringinrejo, sehingga praktik-praktik spiritual khas abangan sebagaimana dituliskan Permana tidak nampak di Desa Wringinrejo. Berdasarkan penuturan informan, peziarah makam dan praktik-praktik pemujaan terhadap makam justru banyak dilakukan oleh warga yang berasal dari luar Desa Wringinrejo.

Konvergensi Santri dan Abangan

Modernitas yang sudah tidak dapat dihindarkan pada masa kini tampaknya juga mengaburkan dikotomi santri dan abangan. Keduanya pada masa kini tidak dipahami sebagai dua kutub yang selalu berseberangan. Dimensi material – spiritual, ritual-rasional di kalangan santri, dan abangan telah menyatu, atau minimal bersinggungan sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang termasuk dalam kategorisasi santri, namun mulai terbuka pada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya diperuntukkan untuk kelompok abangan, begitu juga sebaliknya.

Sebaliknya, Geertz juga menyebutkan bahwa setiap variasi sosial budaya masyarakat Jawa memiliki kehidupan yang eksklusif dengan kelompok sosial budaya lainnya. Pada masa ini, sikap tersebut sudah terkikis. Perjumpaan dan keadaan sosial yang semakin berkembang mendorong setiap kelompok variasi sosial budaya mewujudkan dialog antar budaya

dan agama, membangun inklusivitas kelompok dan kerja sama yang harmoni. Dialog antar budaya dan agama tersebut jelas akan menyingkap segi-segi positif dari semua pihak yang selama ini tertutup oleh eksklusivitas dan egosentrisme masing-masing kelompok.

Kritik senada disebutkan oleh Permana yang menyebutkan bahwa masyarakat abangan Islam Jawa saat ini bersifat lintas kelas, terbuka untuk segala lapisan penduduk dan profesi. Pedagang, pegawai negeri, petani, buruh bangunan adalah beberapa contoh profesi pekerjaan yang dipegang oleh masyarakat Islam Jawa. Ini berbeda dengan Geertz yang melihat bahwa distingsi abangan-santri erat kaitannya dengan basis ekonomi atau pekerjaan tertentu (Permana, 2010).

Berbagai kritik dan irrelevansi terhadap tipologi Geertz inilah yang kemudian dilihat peneliti terjadi dalam situasi dan kondisi di Desa Wringinrejo. Pada analisis sub bab di atas telah ditunjukkan bahwa walaupun pada awalnya Desa Wringinrejo memiliki tradisi khas yang dijalani (Cok Bakal dan Ruwat Desa), yang sebagaimana disebutkan oleh tipologi Geertz bahwa itu semua dijalani oleh kelompok abangan, nyatanta telah mendapatkan penyesuaian oleh kelompok santri melalui proses akulturasi. Dalam Ruwat Desa misalnya dilibatkan kyai-kyai setempat dan pembacaan doa-doa serta ayat Al-Quran yang sebenarnya hal itu lebih mengarah pada kelompok santri. Masing-masing kelompok, baik santri maupun abangan dan priyayi tidak lagi dipandang saling membuat batas wilayah pergaulan sosiologisnya secara eksklusif dan mempunyai budaya dan pola hubungan sosial sendiri-sendiri, sehingga nampak eksklusif, sebagaimana diungkapkan Geertz, melainkan pola hubungan keduanya yang lebih inklusif, dinamis, dan terbuka.

Konvergensi kedua yakni terlihat pada komunitas Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU). Komunitas ini menjadi salah satu basis komunitas yang kuat di Desa Wringinrejo mengingat bahwa mayoritas masyarakat di desa ini adalah Nahdlatul Ulama (NU). Komunitas ini tentunya bergerak dalam bidang keagamaan, sesuai dengan

namanya. Namun di sisi lain, banyak anggota dari kedua komunitas tersebut juga bergerak di berbagai bidang seperti bidang sosial dan ekonomi. Itu dijelaskan ketika peneliti mewawancarai Sekretaris Desa yang sekaligus juga merupakan anggota dari Fatayat Nahdlatul Ulama. Ia menceritakan bahwa banyak anggota Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama juga bergerak dalam bidang sosial seperti menjenguk keluarga desa yang sakit dan mengikuti pelatihan memandikan jenazah. Kerjasama-kerjasama juga dilakukan dengan kelompok sosial lainnya yakni dengan kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Juga banyak wanita yang merupakan anggota Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama tergabung sebagai anggota dari kelompok sosial lainnya seperti Kelompok Wanita Tani (KWT).

Hal tersebut dapat menjadi bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi konvergensi antara kelompok santri dan abangan yang ada di Desa Wringinrejo. Kedua hal di atas menunjukkan bahwa banyak orang yang termasuk dalam dalam kategorisasi santri, namun mulai terbuka pada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya diperuntukkan untuk kelompok abangan, begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Kelompok Santri dalam Pemerintahan Desa

1. Struktur Pemerintahan Desa

Dalam variasi sosial budaya di pemerintahan, Geertz menuliskan bahwa kelompok priyayi selalu menempati jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan (birokrat) sehingga tidak ada ruang khusus bagi kelompok santri, terlebih kelompok abangan, untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan (Geertz, 1960). Namun apa yang disebutkan Geertz tidak terjadi sepenuhnya di Desa Wringinrejo. Relevansi dengan fenomena yang terjadi di Desa Wringinrejo nampak terlihat pada teori yang digagas Mughits. Ia menyebut bahwa penyeragaman (unifromitas) asas tunggal Pancasila pada setiap organisasi sosial dan politik justru memposisikan santri dalam jabatan pemerintahan. Dulu banyak birokrasi ditempati oleh orang dari kelompok priyayi, bahkan kelompok abangan, namun

sekarang dipandang terjadi pembauran dalam semua lini birokrasi pemerintahan (Mughits, 2004).

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan pada wawancara dengan Kepala Dusun Wringinrejo. Ia mengungkapkan bahwa sikap nasionalisme dan sikap kebangsaan lainnya telah menjadi dasar dalam proses berjalannya struktur pemerintahan dan terlebih pada kebijakan yang dihasilkan pemerintahan desa. Juga dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wringinrejo dalam wawancara yang menyebut bahwa mekanisme pemilihan Kepala dan Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Namun, realitas menunjukkan bahwa agama masih memiliki pengaruh terhadap struktur pemerintahan Desa. Setidaknya ada dua hal di mana kelompok santri bukan hanya mendominasi variasi sosial budaya di Desa Wringinrejo, namun juga mendominasi struktur pemerintahan Desa di Desa Wringinrejo. Hal yang pertama yakni keterwakilan dalam struktur pemerintahan desa yang lebih didominasi oleh kelompok santri dan hal yang kedua yakni adanya peran tertentu dari tokoh-tokoh yang mewakili kelompok santri dalam mewujudkan hal yang pertama tersebut.

Keterwakilan dalam struktur pemerintahan Desa yang lebih didominasi oleh kelompok santri terlihat dari profil serta latar belakang terpilihnya Kepala Desa Wringinrejo. Faktor keaktifan Kepala Desa pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan menjadi salah satu alasan terpilihnya ia menjadi Kepala Desa. Faktor agama juga menjadi penting tidak hanya pada jabatan Kepala Desa namun juga pada seluruh jabatan struktural di Pemerintahan Desa. Salah satu ketentuan Undang-Undang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari 7 orang anggota BPD Wringinrejo, terdapat hanya satu orang perwakilan perempuan yang mana beliau sangat aktif dalam kegiatan keagamaan di organisasi Muslimat NU. Masuknya tokoh tersebut dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wringinrejo adalah salah satu

bentuk dominasi keterwakilan dari kelompok santri dalam struktur pemerintahan Desa.

Keterwakilan seperti ini yang kemudian disebut Hannah Pitkin sebagai satu bentuk representasi simbolik (*symbolic representation*). Keterwakilan model ini menjelaskan respon emosional dari perwakilan dan subjek yang diwakili. Jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik (Pitkin, 1972). Dalam realita di Desa Wringinrejo dapat terlihat bagaimana adanya kesamaan identitas berupa agama menjadi faktor kuat keterwakilan kelompok santri di struktur pemerintahan Desa Wringinrejo.

Jika mengacu pada lima model pemerintahan desa yang berorientasi pada adat atau agama, Pemerintahan Desa Wringinrejo perlu dijalankan dengan model integrasi. Model ini berlaku pada suatu desa di mana unsur religio-kultural dalam masyarakat masih kuat, namun di satu sisi, birokrasi yang berguna untuk menjalankan pemerintahan desa masih dibutuhkan (Suwaryo, 2011). Integrasi antara adat, agama, dan pemerintahan desa dapat diwujudkan misalnya dengan aturan yang berlaku. Para birokrat desa bisa menyusun aturan-aturan yang berlaku dengan nilai religio-kultural yang berlaku di Desa Wringinrejo. Melalui musyawarah, perangkat desa bersama tokoh agama menetapkan sanksi dan aturan lokal yang disepakati bersama. Dengan demikian, nilai religio-kultural dapat terinstitusionalkan dengan baik melalui peraturan desa.

2. Politik Klientelisme

Faktor lain yang dapat ditemukan dari dominasi kelompok santri yakni maraknya praktik politik klientelisme. Faktor distribusi barang dan jasa memegang peranan penting dalam praktek klientelisme. Hal tersebut ditegaskan oleh Walle bahwa, "*the selective distribution of good and service by politicians to favored constituents in exchange for their political loyalty*" (van de Walle, 2009).

Hal tersebut nampak dalam praktik politik uang yang terjadi di Desa Wringinrejo. Distribusi berupa uang ataupun bahan pokok dari kandidat kepada

masyarakat memilih terjadi menjelang Pemilihan Kepala Desa Wringinrejo. Begitu juga dengan pencalonan kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa. Historisitas Kepala Desa Wringinrejo membuktikan bahwa jabatan tersebut kerap diisi berdasarkan hubungan pertalian darah dan kekerabatan (*gemeinschaft*). Pemilihan Kepala Desa yang terjadi secara demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat dipandang baru terjadi akhir-akhir ini ketika ada mekanisme legal formal yang berlaku secara nasional. Hal demikian diungkapkan oleh salah satu ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Wringinrejo dalam sesi wawancara. Ia menyebutkan bahwa tidak hanya jabatan Kepala Desa, jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) juga terkadang dipilih berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Kuatnya keterwakilan kelompok santri dalam struktur pemerintahan Desa Wringinrejo tidak terlalu berlaku dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinrejo. Hal tersebut terjadi dikarenakan proses penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan inspektorat dan menggunakan basis elektronik dengan pos-pos yang tersedia. Itu dinilai menyulitkan kelompok santri untuk mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara maksimal.

Hal demikian ditekankan pada sesi wawancara dengan Sekretaris Desa. Pembahasan mengerucut pada aliran dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap pembangunan pesantren di Desa Wringinrejo sebagai salah satu simbol bagi kelompok santri. Informan nyatanya memberikan klarifikasi bahwa bahwa pembangunan pesantren dilakukan melalui penggalangan dana secara mandiri. Begitu juga dengan pembangunan rumah ibadah (dalam hal ini yang dimaksudkan yakni Masjid), bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terdapat pos tersebut sehingga itu dana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak bisa

digunakan pemerintah desa untuk membangun pesantren tersebut.

Adapun kegiatan yang bisa dilakukan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebatas renovasi rumah ibadah. Informasi demikian dapat dilihat pada pos anggaran pemberdayaan masyarakat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinrejo tahun 2018. Anggaran telah direalisasikan sebesar Rp 11.000.000 untuk renovasi sarana & prasarana rumah ibadah. Penggunaan dana tersebut dibenarkan oleh dengan BPD dan Kepala Urusan Keuangan dalam sesi wawancara. Mereka menekankan bahwa terdapat anggaran untuk perawatan sarana dan prasarana rumah ibadah, terlebih lagi mantan Ketua BPD menuturkan bahwa memang pernah terjadi perombakan total musholla yang salah satu dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal selanjutnya yakni ditemukan bahwa terdapat pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 6% atau Rp 74.800.000. Itu meliputi beberapa kegiatan desa yang terkait dengan unsur keagamaan di mana merujuk pada kelompok santri. Kegiatan keagamaan tersebut meliputi penyelenggaraan jamaah tahlil rutin satu desa setiap tiga atau empat kali dalam setahun dan pelatihan bagi masyarakat di desa yang aktif dalam organisasi keagamaan untuk memandikan jenazah. Terkait pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinrejo hanya digunakan untuk penyelenggaraan Ruwat Desa yang dilakukan satu tahun sekali.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa terjadi irrelevansi dari konsep Agama Jawa (santri, abangan, dan priyayi) di Desa Wringinrejo. Analisa di atas menunjukkan bahwa konsep yang digagas Geertz tidak bisa menampung kenyataan yang sebenarnya (*complexity*) dari sifat kejamakan (*pluralism*) masyarakat Desa Wringinrejo. Beberapa irrelevansi lainnya ditunjukkan dengan terjadinya konvergensi antara kelompok santri dan kelompok abangan di Desa Wringinrejo. Itu ditunjukkan dengan adanya akulturasi

antara budaya lokal dengan agama Islam di Desa Wringinrejo dan aktivitas kelompok abangan yang justru dijalani juga oleh kelompok santri, begitu pula sebaliknya.

Dalam dinamika pemerintahan desa, dominasi kaum santri berdampak pada berbagai aspek seperti dalam struktur pemerintahan desa, praktik politik klientelisme yang dijalankan menjelang Pilkades, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Realitas bahwa kaum santri mendominasi dinamika pemerintahan Desa Wringinrejo membawa implikasi bahwa pemerintahan desa dapat dijalankan dengan model integrasi antara agama (kelompok santri), budaya (kelompok abangan), dan birokrasi. Hal demikian menjadi penting dilakukan karena tidak hanya dilandaskan pada realitas Desa Wringinrejo yang linear dengan model tersebut, namun juga mencegah terjadinya konflik di Desa Wringinrejo baik secara horizontal (antara kelompok santri dengan kelompok abangan), ataupun secara vertikal (kelompok santri dan kelompok abangan dengan pemerintah desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ITS Press.
- Billah, M. (1984). *Metodologi Penelitian Pedesaan: Koreksi dan Pembetulan*. LPIS Universitas Kristen Satya Wacana.
- Chalik, A. (2015). Sintesis Mistik Dalam Kepemimpinan Politik Jawa. *Jurnal Review Politik*, 5(2).
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. The Free Press of Glencoe.
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren*. Penerbit Paramadina.
- Mahasin, A. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Dunia Pustaka Jaya.
- Marsono, H. (2000). *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*. Yayasan Studi Jawa - Lembaga Studi Jawa.
- Mufidah, C. (2012). *Pesantren Rakyat: Perhelatan Tradisi Kolaboratif Kaum Abangan dengan Kaum Santri Pinggiran Desa Sumberpucung Kabupaten Malang*. *El Harakah*, 4(1).
- Mughhits, A. (2004). Berakhirnya Mitos Diktomi Santri-Abangan. *Jurnal Fakultas Hukum Ull*, 3(2).
- Pitkin, H. (1972). *The Concept of Representation*. University of California.
- Permana, Y. S. (2010). Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru Di Pedesaan Jawa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Setyawan, K. G., & Khotimah, K. (2019). POLITIK AKOMODATIF DALAM MASYARAKAT MULTI AGAMA. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p1-16>
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi IV. In Jakarta, Penerbit Rajawali.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan otonomi untuk desa. *Governance*, 2(1).
- Suzetta, P. (2007). *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Bappenas, 20(2).
- van de Walle, N. (2009). The Democratization of Political Clientelism in Sub-Saharan Africa. *Paper Prepared for Delivery at the 3rd European Conference on African Studies, Leipzig, Germany, June 4-7 2009*.
- Wearing, S., & Mc Donald, M. (2002). The development of community-based tourism: Re-thinking the relationship between tour operators and development agents as intermediaries in rural and isolated area communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/09669580208667162>